

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor farmasi yang tercatat di BEI pada tahun 2020 hingga 2023. Pemilihan sektor farmasi sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, industri farmasi memiliki ciri khas yang membedakannya dari sektor lain, seperti tingkat regulasi yang ketat, tuntutan inovasi produk yang berkelanjutan, serta ketergantungan pada bahan baku impor yang menjadikannya sensitif terhadap kondisi ekonomi makro dan kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan perpajakan. Kedua, pada periode pandemi COVID-19 hingga fase pemulihan (2020–2023), sektor ini memegang peran penting yang mengalami dinamika keuangan yang signifikan, baik dari aspek pendapatan, pengeluaran, maupun strategi perencanaan pajak. Kondisi tersebut membuka peluang untuk menelaah lebih dalam bagaimana perusahaan-perusahaan farmasi mengelola tata kelola perusahaan, kinerja keuangan, dan pola kepemilikan dalam hubungannya dengan praktik penghindaran pajak. Objek penelitian terdiri dari perusahaan farmasi yang memenuhi kriteria tertentu, seperti:

1. Perusahaan merupakan bagian dari sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-turut selama periode 2020 hingga 2023.
2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap dan dapat diakses publik selama periode observasi.

Tabel 4.1 Hasil Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah
Perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023.	13
Perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangan tahunan lengkap yang bisa diakses setiap tahun selama periode observasi.	(2)
Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian.	11
Rentang periode penelitian	4
Jumlah sampel penelitian	44

Sumber: Diolah Peneliti

4.2 Analisis Data

Analisis data ini menggunakan software *SPSS Statistic 26* untuk mengolah data penelitian. Analisis ini melalui empat empat langkah, yaitu uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian.

4.2.1 Uji Statistik Deskriptif

Uji ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai karakteristik data dari setiap variabel penelitian. Uji statistik ini mencakup nilai minimum, maksimum, mean, dan *standard deviation* dari masing-masing variabel, baik variabel dependen, independen, maupun kontrol.

Tabel 4.2 Uji Statistik Deskriptif – ETR dan BTD

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	44	.02	5.28	.4271	.86244
BTD	44	-.14	.84	.0398	.14406
Tata kelola perusahaan	44	2.00	4.00	3.5455	.54792
Kinerja keuangan	44	.00	.95	.1225	.14968
Kepemilikan manajerial	44	.00	.41	.0277	.08888
Firm size	44	26.00	31.00	28.7727	1.23634
Leverage	44	.13	2.06	.4474	.32205
Capital intensity	44	.08	.55	.3044	.13158
Valid N (listwise)	44				

Sumber: Diolah peneliti melalui SPSS 26

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, variabel *Effective Tax Rate* (ETR) digunakan sebagai indikator penghindaran pajak, dengan nilai minimum tercatat sebesar 0,02 dan maksimum mencapai 5,28. Nilai rata-ratanya berada pada angka 0,4271 dengan standar deviasi sebesar 0,86244. Temuan ini menggambarkan adanya variasi yang cukup besar dalam praktik pembayaran pajak efektif antar perusahaan yang menjadi objek penelitian. Semakin rendah nilai ETR, semakin kuat indikasi bahwa perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Sedangkan, untuk hasil analisis memperlihatkan bahwa variabel penghindaran pajak yang menggunakan indikator BTD memiliki nilai minimum sebesar -0,14 dan maksimum 0,84, dengan rata-rata sebesar 0,0398 serta standar deviasi 0,14406. Nilai BTD yang mendekati nol menunjukkan bahwa perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal relatif kecil, meskipun masih terdapat variasi di antara perusahaan. BTD yang lebih tinggi umumnya menjadi indikasi potensi praktik penghindaran pajak yang lebih besar. Untuk variabel tata kelola perusahaan, skor minimum yang diperoleh adalah 2,00 dan maksimum 4,00, dengan nilai rata-rata sebesar 3,5455 serta standar deviasi sebesar 0,54792. Angka ini menunjukkan

bahwa secara umum, perusahaan dalam sampel memiliki tata kelola yang relatif baik, dengan variasi antar perusahaan yang tidak terlalu tinggi. Selanjutnya, variabel kinerja keuangan memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dan maksimum 0,95. Nilai rata-rata yang tercatat adalah 0,1225 dengan standar deviasi 0,14968. Rata-rata kinerja keuangan yang tergolong rendah ini mencerminkan tingkat efisiensi laba terhadap total aset yang masih berada pada level moderat di dalam sampel penelitian.

Pada variabel kepemilikan manajerial, ditemukan nilai minimum sebesar 0,00 dan maksimum 0,41, dengan rata-rata sebesar 0,0277 dan standar deviasi sebesar 0,08888. Rata-rata yang relatif kecil ini menandakan bahwa proporsi kepemilikan saham oleh pihak manajemen relatif kecil, sehingga kemungkinan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan strategis perusahaan, termasuk dalam pengelolaan pajak mungkin terbatas. Untuk variabel kontrol *firm size*, nilai minimum tercatat sebesar 26,00 dan maksimum sebesar 31,00, dengan rata-rata 28,7727 serta standar deviasi 1,23634. Hasil ini mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan dalam sampel cukup bervariasi namun umumnya tergolong besar. Variabel *leverage* menunjukkan nilai minimum sebesar 0,13 dan maksimum 2,06, dengan rata-rata 0,4474 dan standar deviasi 0,32205. Hal ini mengisyaratkan bahwa sebagian besar perusahaan dalam sampel memanfaatkan pendanaan utang dalam struktur modal mereka. Terakhir, variabel *capital intensity* memiliki rata-rata sebesar 0,3044, dengan nilai minimum 0,08 dan maksimum 0,55, serta standar deviasi sebesar 0,13158. Angka-angka tersebut menunjukkan adanya variasi yang cukup beragam dalam tingkat intensitas modal.

4.2.2 Uji Outlier

Sebelum dilakukan uji asumsi klasik dan regresi linier berganda, peneliti terlebih dahulu melakukan proses identifikasi terhadap data outlier guna memastikan tidak adanya nilai ekstrem yang dapat memengaruhi akurasi hasil analisis statistik. Prosedur ini dilakukan dengan pendekatan *standardized residual* dan diperkuat melalui visualisasi *boxplot* untuk mendeteksi data yang menyimpang signifikan dari distribusi normal. Hasil pengujian menunjukkan adanya sejumlah observasi yang memiliki nilai *standardized residual* di luar rentang ± 3 . Nilai-nilai tersebut dikategorikan sebagai outlier karena berpotensi menimbulkan distorsi dalam model regresi serta tidak mencerminkan pola umum dalam dataset.

Secara teoritis, keberadaan outlier yang letaknya jauh dari pusat distribusi data dapat bertindak sebagai *high leverage points*, yaitu titik yang secara tidak proporsional memengaruhi kemiringan (*slope*) koefisien regresi, memperbesar *standard error*, serta pada akhirnya menurunkan validitas kesimpulan penelitian (Hair et al., 2019). Keberadaan outlier juga dapat mengaburkan hubungan sebenarnya antar variabel karena memunculkan efek yang tidak mewakili kondisi mayoritas (Gujarati & Porter, 2012). Dengan demikian, penghapusan outlier yang tidak mencerminkan karakteristik populasi utama dipandang sebagai langkah metodologis yang dibenarkan untuk menjaga reliabilitas model dan akurasi estimasi parameter.

Setelah dilakukan penelaahan terhadap masing-masing kasus, sebanyak 19 observasi diputuskan untuk dikeluarkan dari sampel penelitian karena dianggap tidak merepresentasikan kondisi populasi secara umum dan berisiko menghasilkan

bias. Dengan demikian, jumlah akhir data yang digunakan dalam analisis regresi berjumlah 25 observasi. Langkah ini diambil guna meningkatkan validitas dan reliabilitas model yang dikembangkan, sehingga hasil regresi yang dihasilkan mampu menggambarkan hubungan antara variabel tata kelola perusahaan, kinerja keuangan, kepemilikan manajerial, serta variabel kontrol terhadap praktik penghindaran pajak secara lebih akurat dan dapat dipercaya.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

4.2.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data residual dari model regresi terdistribusi secara normal. Asumsi ini penting dalam regresi linier klasik karena terdistribusi residual yang tidak normal bisa memengaruhi validitas pengujian hipotesis, seperti uji t dan uji F.

Tabel 4.3 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov – ETR

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		25
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.03794150
Most Extreme Differences	Absolute	.129
	Positive	.124
	Negative	-.129
Test Statistic		.129
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Diolah peneliti melalui SPSS 26

Hasil uji K-S pada model regresi dengan ETR sebagai variabel dependen menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa data residual pada model regresi tersebut terdistribusi secara normal.

Tabel 4.4 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov – BTD

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		25
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.03430280
Most Extreme Differences	Absolute	.134
	Positive	.134
	Negative	-.088
Test Statistic		.134
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Diolah peneliti melalui SPSS 26

Pada tabel 4.4 memuat nilai Asymp. Sig. sebesar $0,200 > 0,05$ menunjukkan bahwa distribusi residual dari model regresi BTD tidak menyimpang secara signifikan dari distribusi normal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas pada model regresi dengan BTD telah terpenuhi.

4.2.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan linear antar variabel independen dalam suatu model regresi. Adanya multikolinearitas berpotensi menimbulkan distorsi pada hasil analisis regresi

dengan cara meningkatkan varians estimasi parameter, sehingga mengurangi ketepatan prediksi yang dihasilkan. Pada penelitian ini, pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menganalisis nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) yang diperoleh melalui regresi berganda menggunakan SPSS. Pengambilan keputusan didasarkan pada kriteria berikut: model dianggap bebas dari masalah multikolinearitas jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 .

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Tata Kelola perusahaan (X1)	.499	2.006
	Kinerja Keuangan (X2)	.582	1.717
	Kepemilikan manajerial (X3)	.346	2.889
	Firm size (K1)	.428	2.334
	Leverage (K2)	.406	2.461
	Capital intensity (K3)	.424	2.358
a. Dependent Variable: ETR, BTD			

Sumber: Diolah peneliti melalui SPSS 26

Variabel tata kelola perusahaan memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,499 dan VIF 2,006, sedangkan variabel kinerja keuangan (ROA) memiliki nilai *tolerance* 0,582 dan VIF 1,717. Kepemilikan manajerial menunjukkan nilai *tolerance* terendah sebesar 0,346 dengan VIF tertinggi 2,889, namun masih dalam batas aman. Variabel kontrol *firm size* memiliki nilai *tolerance* 0,428 dan VIF 2,334. Variabel *leverage* memperoleh nilai *tolerance* 0,406 dengan VIF 2,46, dan variabel *capital intensity* memperoleh nilai *tolerance* 0,424 dengan VIF 2,358. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dan variabel

kontrol memiliki nilai *tolerance* di atas 0,10 dan VIF di bawah 10. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi ini.

4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah varians dari residual pada model regresi bersifat konstan atau tidak. Ketika varians residual tidak konstan, artinya terjadi heteroskedastisitas, kondisi ini menunjukkan pelanggaran terhadap salah satu asumsi klasik regresi dan berpotensi membuat hasil estimasi menjadi kurang efisien. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan metode uji glejser, yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap seluruh variabel independen dan kontrol. Jika nilai signifikansi (Sig.) dari masing-masing variabel $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.6 Hasil Uji Glejser – ETR

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.045	.172		.259	.799
	Tata kelola perusahaan	-.001	.014	-.027	-.099	.922
	Kinerja keuangan	-.154	.118	-.334	-1.306	.208
	Kepemilikan manajerial	-.024	.112	-.070	-.211	.835
	Firm size	-.001	.006	-.031	-.102	.920
	Leverage	.029	.047	.188	.613	.548
	Capital intensity	.048	.057	.254	.849	.407
a. Dependent Variable: ETR						

Sumber: Diolah peneliti melalui SPSS 26

Berdasarkan hasil uji glejser untuk model variabel dependen dengan menggunakan ETR, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,922 untuk variabel tata kelola perusahaan, 0,208 untuk kinerja keuangan (ROA), 0,835 untuk variabel kepemilikan manajerial, 0,920 untuk *firm size*, 0,548 untuk *leverage*, 0,407 untuk *capital intensity*. Seluruh nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak ada variabel yang berpengaruh signifikan terhadap nilai absolut residual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi penghindaran pajak yang diukur dengan ETR tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4.7 Hasil Uji Glejser – BTD

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.020	.183		-.112	.912
	Tata kelola perusahaan	-.002	.015	-.040	-.136	.894
	ROA	.016	.126	.036	.131	.897
	Kepemilikan manajerial	-.079	.120	-.235	-.658	.519
	Firm size	.001	.006	.080	.249	.806
	Leverage	.052	.050	.343	1.041	.312
	Capital intensity	-.033	.060	-.176	-.547	.591
a. Dependent Variable: BTD						

Sumber: Diolah peneliti melalui SPSS 26

Sementara itu, hasil uji glejser untuk model variabel dependen dengan menggunakan BTD menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,894 untuk tata kelola perusahaan, 0,897 untuk kinerja keuangan, kepemilikan manajerial sebesar 0,519. Sedangkan *firm size* sebesar 0,806, variabel *leverage* dengan nilai signifikansi 0,312, dan 0,591 untuk *capital intensity*. Seluruh nilai signifikansi tersebut juga lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah

heteroskedastisitas dalam model regresi penghindaran pajak yang diukur dengan BTD.

4.2.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mendeteksi adanya hubungan antar nilai residual dalam suatu model regresi. Dalam regresi linear klasik, salah satu asumsi penting yang wajib dipenuhi adalah tidak adanya autokorelasi, artinya residual dari satu observasi seharusnya tidak berkorelasi dengan residual observasi lainnya. Apabila autokorelasi terjadi, terutama pada data *time series* atau data panel, hal ini dapat membuat hasil estimasi menjadi kurang efisien dan menurunkan tingkat keandalan hasil analisis. Dalam penelitian ini, pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan metode *Durbin-Watson* (DW).

Tabel 4.8 Uji Durbin-Watson – ETR

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.737 ^a	.543	.391	.04381	1.868
a. Predictors: (Constant), Capital intensity, Kepemilikan manajerial, Kinerja keuangan, Tata kelola perusahaan, Firm size, Leverage					
b. Dependent Variable: ETR					

Sumber: Diolah peneliti melalui SPSS 26

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 1,868. Nilai batas bawah (d_L) dan batas atas (d_U) pada taraf signifikansi 5%. Karena nilai DW berada pada rentang $d_U < d < 4 - d_U$ atau $1,835 < 1,868 < 2,165$, maka dapat disimpulkan bahwa model dengan proksi ETR tidak mengandung autokorelasi, sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 4.9 Uji Durbin-Watson – BTD

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.655 ^a	.429	.239	.03961	1.858
a. Predictors: (Constant), Capital intensity, Kepemilikan manajerial, Kinerja keuangan, Tata kelola perusahaan, Firm size, Leverage					
b. Dependent Variable: BTD					

Sumber: Diolah peneliti melalui SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh nilai DW sebesar 1,858. Nilai batas bawah (d_L) dan batas bawah (d_U) pada taraf signifikansi 5%. Karena nilai DW berada pada rentang $d_U < d < 4 - d_U$ atau $1,835 < 1,858 < 2,165$, maka dapat disimpulkan bahwa model dengan proksi BTD tidak mengandung autokorelasi, sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

4.2.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.10 Analisis Regresi Linier Berganda – ETR

Coefficients^a			
Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	.393	.333
	Tata kelola perusahaan	-.020	.027
	Kinerja keuangan	-.482	.229
	Kepemilikan manajerial	-.342	.218
	Firm size	.003	.011
	Leverage	-.342	.091
	Capital intensity	-.007	.109
a. Dependent Variable: ETR			

Sumber: Diolah peneliti melalui SPSS 26

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$ETR = 0,393 - 0,020CG - 0,482ROA - 0,342MO + 0,003SIZE - 0,342LEV - 0,007CAPINT + \varepsilon$$

Rumus ini dapat diartikan sebagai berikut:

- Persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Nilai konstanta sebesar 0,393 berarti bahwa ketika semua variabel independen bernilai nol, tingkat penghindaran pajak yang diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR) berada pada angka 0,393. Ini menjadi titik awal ETR sebelum mempertimbangkan pengaruh variabel lain dalam model.
- Koefisien variabel tata kelola perusahaan sebesar -0,020 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit skor tata kelola, dengan asumsi variabel lain tetap konstan, akan menurunkan ETR sebesar 0,020. Karena koefisiennya negatif ini mengisyaratkan bahwa semakin baik tata kelola perusahaan, semakin tinggi potensi penghindaran pajak.
- Pada variabel kinerja keuangan (ROA), koefisien -0,482 menunjukkan bahwa kenaikan satu unit ROA menurunkan ETR sebesar 0,482. Artinya, perusahaan yang lebih menguntungkan justru cenderung memiliki beban pajak efektif yang lebih rendah, dan mencerminkan strategi penghindaran pajak yang lebih agresif.
- Variabel kepemilikan manajerial memiliki koefisien sebesar -0,342. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan menurunkan nilai ETR sebesar 0,342, yang berarti mendorong peningkatan penghindaran pajak.

- Untuk variabel kontrol *firm size*, koefisien 0,003 berarti setiap kenaikan ukuran perusahaan sedikit meningkatkan ETR. Ini menunjukkan kecenderungan perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki kepatuhan pajak lebih tinggi, meski pengaruhnya sangat kecil.
- Variabel *leverage* memiliki koefisien -0,342, yang berarti semakin tinggi rasio utang, semakin rendah ETR yang dibayarkan. Hal ini sesuai dengan konsep bahwa bunga pinjaman dapat mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga mendorong potensi penghindaran pajak.
- Terakhir, *capital intensity* memiliki koefisien -0,007, menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas modal (proporsi aset tetap terhadap total aset) maka semakin rendah ETR yang dibayarkan. Hal ini mungkin disebabkan oleh tingginya biaya penyusutan yang menurunkan penghasilan kena pajak.

Secara keseluruhan, sebagian besar variabel dalam model memiliki hubungan negatif dengan ETR, yang mencerminkan kecenderungan penghindaran pajak. Namun, penting untuk tetap mempertimbangkan nilai signifikansi masing-masing koefisien dari hasil uji t untuk menilai kekuatan pengaruh tersebut secara statistik.

Tabel 4.11 Analisis Regresi Linier Berganda – BTD

Coefficients ^a			
Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	-.645	.301
	Tata kelola perusahaan	.010	.024
	Kinerja keuangan	.373	.207
	Kepemilikan manajerial	-.085	.197
	Firm size	.018	.010
	Leverage	.213	.082
	Capital intensity	-.087	.099
a. Dependent Variable: BTB			

Sumber: Diolah peneliti melalui SPSS 26

Berdasarkan hasil regresi linier berganda dengan *Book Tax Difference* (BTD) sebagai variabel dependen, diperoleh model regresi sebagai berikut:

$$\text{BTD} = -0,645 + 0,010\text{CG} + 0,373\text{ROA} - 0,085\text{MO} + 0,018\text{SIZE} + 0,213\text{LEV} - 0,087\text{CAPINT} + \varepsilon$$

Rumus ini dapat diartikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar $-0,645$ mengindikasikan bahwa apabila seluruh variabel independen dan kontrol bernilai nol, maka nilai BTB perusahaan diperkirakan sebesar $-0,645$. Ini merepresentasikan titik awal BTB sebelum mempertimbangkan pengaruh variabel lain dalam model.
- Koefisien tata kelola perusahaan sebesar $0,010$ menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit skor GCG, dengan asumsi variabel lain tetap, akan meningkatkan BTB sebesar $0,010$. Hubungan positif ini menandakan bahwa semakin tinggi tata kelola yang diterapkan, justru berpotensi meningkatkan

selisih antara laba komersial dan fiskal, yang bisa dikaitkan dengan penghindaran pajak.

- Pada variabel kinerja keuangan, koefisien sebesar 0,373 berarti bahwa peningkatan profitabilitas perusahaan akan meningkatkan BTD sebesar 0,373. Hal ini mencerminkan kecenderungan perusahaan yang lebih menguntungkan untuk memiliki selisih yang lebih besar antara laba akuntansi dan laba fiskal, yang kerap dikaitkan dengan strategi penghindaran pajak.
- Di sisi lain, variabel kepemilikan manajerial menunjukkan koefisien regresi sebesar -0,085. Angka ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kepemilikan saham oleh pihak manajemen, maka semakin kecil nilai BTD perusahaan, yakni menurun sebesar 0,085. Arah hubungan yang negatif ini mencerminkan bahwa kepemilikan manajerial dapat menurunkan insentif untuk melakukan penghindaran pajak.
- Pada variabel kontrol, *firm size* memiliki koefisien 0,018. Ini berarti bahwa perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki nilai BTD lebih tinggi, yang dapat menunjukkan adanya upaya penghindaran pajak yang lebih intensif di kalangan perusahaan berskala besar.
- *Leverage* memperlihatkan koefisien sebesar 0,213. Artinya, semakin tinggi rasio utang perusahaan semakin besar pula kenaikan nilai BTD, yang sejalan dengan pandangan bahwa perusahaan memanfaatkan beban bunga sebagai sarana efisiensi pajak.

- Sebaliknya, variabel *capital intensity* memiliki koefisien -0,087. Hubungan negatif ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan intensitas modal tinggi cenderung memiliki perbedaan laba yang lebih kecil antara fiskal dan komersial.

Secara keseluruhan, arah koefisien dalam model ini sebagian besar konsisten dengan teori, meskipun untuk memastikan kekuatan dan validitas hubungan antar variabel terhadap BTD sebagai proksi penghindaran pajak, diperlukan telaah lebih lanjut terhadap nilai signifikansi dalam uji t.

4.2.5 Uji Hipotesis

4.2.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen dalam suatu model regresi.

Tabel 4.12 Uji Koefisien Determinasi (R^2) – ETR

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.737 ^a	.543	.391	.04381
a. Predictors: (Constant), Capital intensity, Kepemilikan manajerial, Kinerja keuangan, Tata kelola perusahaan, Firm size, Leverage				
b. Dependent Variable: ETR				

Sumber: Diolah peneliti melalui SPSS 26

Hasil pengujian pada tabel diatas yang menunjukkan bahwa nilai *R Square* sebesar 0,543 dan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,391. Nilai *R Square* sebesar 0,543 mengindikasikan bahwa sebesar 54,3% variasi dalam penghindaran pajak

(ETR) dapat dijelaskan oleh variabel independen dan kontrol yang digunakan dalam model. Sementara itu, sebesar 45,7% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model atau faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Penggunaan nilai *Adjusted R Square* dianggap lebih tepat untuk model yang memuat banyak variabel independen, karena ukuran ini telah disesuaikan agar mempertimbangkan jumlah variabel dalam model serta jumlah observasi yang digunakan. Dalam konteks penelitian ini, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,391 mengindikasikan bahwa setelah penyesuaian dilakukan, model masih mampu menjelaskan sekitar 39,1% variasi dalam penghindaran pajak (ETR). Meskipun demikian, nilai tersebut tetap menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediktif yang moderat, sekaligus dapat dijadikan dasar bagi penelitian selanjutnya untuk menambahkan variabel lain yang relevan guna memperkuat daya jelaskan model.

Tabel 4.13 Uji Koefisien Determinasi (R^2) – BTD

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.655 ^a	.429	.239	.03961
a. Predictors: (Constant), Capital intensity, Kepemilikan manajerial, Kinerja keuangan, Tata kelola perusahaan, Firm size, Leverage				
b. Dependent Variable: BTD				

Sumber: Diolah peneliti melalui SPSS 26

Hasil uji yang ditampilkan dalam Tabel 4.13 menunjukkan nilai *R Square* sebesar 0,429 dan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,239. Hal ini berarti bahwa sebesar 42,9% variasi dalam praktik penghindaran pajak (BTD) bisa dijelaskan oleh

variabel-variabel independen dan kontrol yang dimasukkan ke dalam model. Sementara itu, 57,1% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Pada nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,239 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel prediktor dalam model, kemampuan model dalam menjelaskan variasi penghindaran pajak adalah sebesar 23,9%, yang mengindikasikan kontribusi moderat dari model terhadap variabel dependen. Walaupun nilai *Adjusted R²* yang diperoleh tidak tinggi, model ini tetap mampu memberikan gambaran yang relevan mengenai hubungan antara variabel-variabel penelitian dengan penghindaran pajak yang diukur melalui perbedaan akuntansi dan fiskal. Hasil ini sekaligus membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk memasukkan variabel tambahan atau memanfaatkan proksi lain guna meningkatkan kemampuan prediksi model secara lebih optimal.

4.2.5.2 Uji Statistik F

Uji statistik F atau uji signifikansi simultan dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen yang digunakan dalam model secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.14 Uji Statistik F – ETR

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.041	6	.007	3.569	.017 ^b
	Residual	.035	18	.002		
	Total	.076	24			
a. Dependent Variable: ETR						
b. Predictors: (Constant), Capital intensity, Kepemilikan manajerial, Kinerja keuangan, Tata kelola perusahaan, Firm size, Leverage						

Sumber: Diolah peneliti melalui SPSS 26

Analisis ini dilakukan menggunakan metode regresi linier berganda yang diolah melalui aplikasi SPSS, dan hasilnya disajikan dalam Tabel ANOVA. Berdasarkan output SPSS pada Tabel 4.14, diperoleh nilai F hitung sebesar 3,569 dengan signifikansi sebesar 0,017. Nilai ini lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 yang menunjukkan bahwa model regresi secara simultan signifikan. Artinya, seluruh variabel independen dan kontrol dalam model secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel *tax avoidance* (ETR). Hasil tersebut mendukung hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa variabel-variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.

Tabel 4.15 Uji Statistik F – BTD

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.021	6	.004	2.256	.085 ^b
	Residual	.028	18	.002		
	Total	.049	24			
a. Dependent Variable: BTD						
b. Predictors: (Constant), Capital intensity, Kepemilikan manajerial, Kinerja keuangan, Tata kelola perusahaan, Firm size, Leverage						

Sumber: Diolah peneliti melalui SPSS 26

Berdasarkan output SPSS pada Tabel 4.15, diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 2,256 dengan nilai signifikansi sebesar 0,085. Nilai signifikansi ini lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 yang berarti bahwa model regresi secara simultan tidak signifikan. Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap BTD sebagai ukuran penghindaran

pajak. Temuan ini tidak mendukung hipotesis bahwa seluruh variabel independen memiliki pengaruh bersama terhadap penghindaran pajak dalam bentuk BTD.

4.2.5.3 Uji Statistik t

Uji statistik digunakan mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai sejauh mana masing-masing faktor independen, baik utama maupun kontrol, memengaruhi perilaku *tax avoidance* perusahaan.

Tabel 4.16 Uji Statistik t – ETR

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.393	.333		1.181	.253
	Tata kelola perusahaan	-.020	.027	-.166	-.737	.471
	Kinerja keuangan	-.482	.229	-.440	-2.107	.049
	Kepemilikan manajerial	-.342	.218	-.425	-1.569	.134
	Firm size	.003	.011	.067	.274	.787
	Leverage	-.342	.091	-.938	-3.755	.001
	Capital intensity	-.007	.109	-.016	-.067	.947

Sumber: Diolah peneliti melalui SPSS 26

Berdasarkan hasil tabel 4.16, dapat diketahui bahwa tidak semua variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ETR. Variabel tata kelola perusahaan, misalnya, memperlihatkan nilai signifikansi sebesar 0,471 dengan koefisien -0,020 dan nilai t sebesar -0,737. Karena nilai signifikansinya melebihi 0,05, maka secara parsial dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan tidak

memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, variabel kinerja keuangan yang diukur melalui *Return on Assets* (ROA) menunjukkan hasil berbeda. Nilai signifikansinya tercatat sebesar 0,049, dengan koefisien -0,482 dan nilai t sebesar -2,107. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 mengindikasikan bahwa ROA memiliki pengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap ETR. Dengan kata lain, semakin tinggi kinerja keuangan perusahaan, semakin kecil ETR yang dilaporkan, sehingga mencerminkan praktik penghindaran pajak yang lebih tinggi.

Variabel kepemilikan manajerial menunjukkan nilai koefisien -0,342 dengan nilai signifikansi 0,134. Hasil ini mengindikasikan bahwa pengaruh kepemilikan manajemen terhadap ETR tidak signifikan secara statistik. Meskipun demikian, arah koefisien yang negatif konsisten dengan prinsip dalam teori agensi, yang menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen berpotensi menyelaraskan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, sehingga dapat mengurangi insentif melakukan penghindaran pajak. Namun, tidak signifikannya hasil ini mengisyaratkan bahwa faktor kepemilikan manajerial dalam sampel belum menjadi mekanisme kontrol efektif terhadap kebijakan pajak perusahaan.

Untuk variabel kontrol, *firm size* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,787 dengan koefisien 0,003 dan nilai t sebesar 0,274. Hasil ini menunjukkan bahwa *firm size* tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap ETR. Berbeda halnya dengan *leverage*, yang memperlihatkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan nilai signifikansi 0,001, koefisien -0,342, dan nilai t sebesar -3,755. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi *leverage*

perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Adapun variabel *capital intensity* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,947, koefisien -0,007, dan nilai t sebesar -0,067, yang menandakan tidak adanya pengaruh signifikan terhadap ETR.

Tabel 4.17 Uji Statistik t – BTD

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.645	.301		-2.144	.046
	Tata kelola perusahaan	.010	.024	.103	.410	.687
	Kinerja keuangan	.373	.207	.420	1.802	.088
	Kepemilikan manajerial	-.085	.197	-.130	-.430	.672
	Firm size	.018	.010	.507	1.862	.079
	Leverage	.213	.082	.722	2.584	.019
	Capital intensity	-.087	.099	-.241	-.882	.390

Sumber: Diolah peneliti melalui SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.17, variabel tata kelola perusahaan menunjukkan koefisien sebesar 0,010, nilai t sebesar 0,410, dan signifikansi 0,687. Karena tingkat signifikansi melebihi 0,05, dapat disimpulkan bahwa secara parsial, tata kelola perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap BTD. Temuan ini bertentangan dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa tata kelola yang baik mampu menekan praktik penghindaran pajak, yang dalam konteks BTD justru tidak menunjukkan hubungan berarti.

Kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA menghasilkan koefisien sebesar 0,373, nilai t sebesar 1,802, dan signifikansi 0,088. Meskipun arah

hubungannya positif, menunjukkan kecenderungan bahwa semakin baik kinerja keuangan, semakin tinggi nilai BTD (yang menandakan penghindaran pajak meningkat), namun secara statistik pengaruh ini tidak signifikan. Oleh karena itu, hasil ini tidak sepenuhnya mendukung hipotesis, meski arah hubungannya sejalan dengan dugaan teoritis dan beberapa temuan terdahulu.

Untuk variabel kepemilikan manajerial, koefisien sebesar -0,085, nilai t sebesar -0,430, dan signifikansi sebesar 0,672 mengindikasikan bahwa pengaruhnya terhadap BTD juga tidak signifikan. Arah koefisien yang negatif mencerminkan bahwa semakin besar kepemilikan saham oleh manajer, kecenderungan penghindaran pajak menurun, sejalan dengan teori agensi. Namun, karena tidak signifikan, kepemilikan manajerial belum terbukti sebagai mekanisme kontrol yang efektif dalam konteks penelitian ini.

Di sisi lain, variabel kontrol *leverage* menunjukkan pengaruh signifikan dengan koefisien 0,213, nilai t 2,584, dan signifikansi 0,019. Nilai ini berarti *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* (BTD), sehingga semakin tinggi tingkat utang, semakin besar peluang untuk melakukan penghindaran pajak. Sementara itu, *firm size* dan *capital intensity* masing-masing memiliki nilai signifikansi sebesar 0,079 dan 0,390. Meskipun *firm size* hampir mendekati ambang signifikansi ($p < 0,1$), secara umum tetap dianggap tidak signifikan pada tingkat 5%. Dengan demikian, hanya *leverage* yang secara statistik terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance* dalam model ini.

Tabel 4.18 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis – ETR

Hipotesis	Variabel Independen	Nilai t	Signifikansi	Kesimpulan
H _{1a} : Tata kelola perusahaan berpengaruh negatif terhadap praktik <i>tax avoidance</i>	Tata Kelola Perusahaan	-0.737	0.471	Hipotesis Pertama Ditolak
H _{2a} : Kinerja keuangan berpengaruh negatif terhadap praktik <i>tax avoidance</i>	Kinerja Keuangan	-2.107	0.049	Hipotesis Kedua Diterima
H _{3a} : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap praktik <i>tax avoidance</i>	Kepemilikan Manajerial	-1.569	0.134	Hipotesis Ketiga Ditolak

Sumber: Diolah Peneliti

Tabel 4.19 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis – BTD

Hipotesis	Variabel Independen	Nilai t	Signifikansi	Kesimpulan
H _{1b} : Tata kelola perusahaan berpengaruh negatif terhadap praktik <i>tax avoidance</i>	Tata Kelola Perusahaan	0.410	0.687	Hipotesis Pertama Ditolak
H _{2b} : Kinerja keuangan berpengaruh negatif terhadap praktik <i>tax avoidance</i>	Kinerja Keuangan	1.802	0.088	Hipotesis Kedua Ditolak

Hipotesis	Variabel Independen	Nilai t	Signifikansi	Kesimpulan
H _{3b} : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap praktik <i>tax avoidance</i> .	Kepemilikan Manajerial	-0.430	0.672	Hipotesis Ketiga Ditolak

Sumber: Diolah Peneliti

4.3 Interpretasi Hasil

Dalam penelitian ini menggunakan dua model proksi untuk mengukur *tax avoidance*, yaitu dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) dan *Book-tax Differences* (BTD), untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai strategi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk penjelasan pada masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

4.3.1 Interpretasi Hasil *Effective Tax Rate* (ETR)

4.3.1.1 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis pertama dalam penelitian ini mengemukakan bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Namun, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel tata kelola perusahaan menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,471 dan nilai t sebesar -0,737. Karena nilai signifikansi tersebut jauh melebihi ambang batas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh tata kelola perusahaan terhadap *tax avoidance* tidak signifikan secara statistik. Hasil ini diperoleh meskipun model telah memasukkan variabel kontrol seperti *firm size*, *leverage*, dan *capital intensity* untuk mengendalikan pengaruh

faktor lain yang relevan. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini ditolak.

Tata kelola perusahaan berperan sebagai sistem pengawasan dan pengendalian untuk memastikan bahwa tindakan manajemen sejalan dengan kepentingan pemegang saham serta pihak berkepentingan lainnya. Dalam konteks perpajakan, tata kelola yang baik diharapkan dapat membatasi ruang gerak manajer dalam melakukan tindakan oportunistik, termasuk memanfaatkan celah hukum untuk menghindari pajak. Akan tetapi, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa keberadaan tata kelola dalam perusahaan sampel belum cukup optimal atau efektif untuk memengaruhi tingkat penghindaran pajak, bahkan setelah mempertimbangkan variabel kontrol tersebut dalam analisis. Temuan ini dapat dijelaskan melalui konteks kelembagaan di Indonesia, di mana struktur tata kelola perusahaan kerap kali masih bersifat formalitas dan belum dilaksanakan secara substansial (Wijayati, 2022). Kualitas pengawasan yang dijalankan oleh dewan komisaris, komite audit, maupun mekanisme internal lainnya sering kali belum berjalan secara efektif. Dengan lemahnya implementasi, keberadaan struktur tata kelola justru tidak cukup untuk membatasi strategi praktik penghindaran pajak yang sifatnya kompleks dan teknis, seperti pengalihan laba antar entitas, pemanfaatan insentif pajak secara agresif, atau manipulasi waktu pengakuan pendapatan. Akibatnya, praktik penghindaran pajak tetap dapat terjadi dan tidak sepenuhnya dapat diidentifikasi atau dicegah, meskipun struktur tata kelola secara formal telah diterapkan dalam perusahaan.

Selain itu, perbedaan antara ekspektasi teoritis dan hasil empiris ini dapat dijelaskan melalui teori agensi. Secara konsep, tata kelola perusahaan memang dimaksudkan untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik. Namun, pengaruhnya tidak akan muncul secara signifikan apabila mekanisme sistem pengawasan internal tidak memiliki wewenang yang kuat, tidak independen, atau tidak disertai dengan tingkat transparansi serta akuntabilitas yang memadai dalam pelaksanaannya. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdelfattah & Aboud (2020), yang menyimpulkan bahwa di negara berkembang, tata kelola perusahaan tidak selalu efektif dalam menekan *tax avoidance*. Hal serupa juga ditegaskan oleh Kerr et al., (2024), yang menyatakan bahwa pengaruh signifikan dari tata kelola terhadap penghindaran pajak hanya dapat terjadi apabila terdapat reformasi kelembagaan yang memperkuat independensi dewan serta efektivitas fungsi pengawasan. Tanpa dukungan kualitas dan integritas, keberadaan tata kelola tidak cukup untuk menekan tingkat penghindaran pajak secara signifikan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola perusahaan dalam menekan praktik penghindaran pajak sangat bergantung pada kualitas implementasi dan komitmen manajemen puncak. Regulasi yang hanya berfokus pada kepatuhan struktural belum cukup untuk mengurangi penghindaran pajak tanpa penguatan pada aspek substansial seperti transparansi, integritas pelaporan keuangan, dan akuntabilitas pengawasan internal. Pemerintah dan regulator diharapkan mampu menyusun kebijakan tata kelola yang tidak

sekadar berfokus pada aspek kepatuhan administratif, melainkan juga mendorong transparansi terhadap strategi perpajakan yang diterapkan oleh perusahaan.

4.3.1.2 Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis kedua dalam penelitian ini mengemukakan bahwa kinerja keuangan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,049 dan nilai t sebesar -2,107 untuk hubungan antara kinerja keuangan dan *tax avoidance* yang diukur melalui ETR. Karena nilai signifikansi ini berada di bawah ambang batas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini diterima.

Profitabilitas yang diukur melalui ROA menggambarkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dari total aset yang dimilikinya. Berdasarkan regresi yang dilakukan, ditemukan bahwa semakin tinggi *Return on Assets* (ROA), semakin rendah ETR yang berarti bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak lebih besar. Temuan ini sejalan dengan pandangan teori agensi, yang menyatakan bahwa manajer sebagai agen memiliki kecenderungan bertindak oportunistik demi memaksimalkan kepentingan pribadi. Dengan tingginya tingkat profitabilitas, manajer memiliki lebih banyak sumber daya dan justifikasi untuk menjalankan strategi penghindaran pajak, misalnya melalui rekayasa pengeluaran, *transfer pricing*, atau pemanfaatan insentif pajak secara agresif, untuk menekan beban pajak dan menjaga laba setelah

pajak tetap tinggi. Analisis ini juga telah mempertimbangkan variabel kontrol seperti *firm size*, *leverage*, dan *capital intensity*, sehingga pengaruh kinerja keuangan terhadap ETR diinterpretasikan sebagai pengaruh bersih yang sudah mengendalikan faktor-faktor lain yang relevan. Dengan kontrol tersebut, temuan ini menunjukkan bahwa ROA tetap memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan ETR.

Hal ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gowira et al., (2024), yang menemukan bahwa ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR pada perusahaan di Indonesia. Penelitian tersebut menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk menghindari kewajiban pajak demi menjaga efisiensi beban pajak. Selain itu, penelitian oleh Kobbi-Fakhfakh & Bougacha (2023) terhadap perusahaan S&P 500, yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat keuntungan tinggi cenderung memperluas strategi penghindaran pajak, terutama dalam kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian, guna menjaga stabilitas arus kas.

Secara menyeluruh, hasil penelitian ini mengindikasikan perlunya pengawasan dan regulasi yang lebih cermat terhadap perusahaan-perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat mengenali berbagai celah dalam kebijakan pajak yang sering kali dimanfaatkan secara agresif untuk mengurangi beban pajak. Dengan memperhatikan karakteristik keuangan perusahaan, pembuat kebijakan bisa merancang aturan yang lebih efektif untuk mencegah *tax avoidance* yang berlebihan tanpa menghambat iklim investasi.

4.3.1.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Namun, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai signifikansi sebesar 0,134 dengan nilai t sebesar -1,569. Karena nilai signifikansi tersebut melebihi ambang batas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* tidak signifikan secara statistik. Hasil ini diperoleh meskipun model regresi telah mengendalikan variabel kontrol seperti *firm size*, *leverage*, dan *capital intensity* untuk memastikan pengaruh bersih dari kepemilikan manajerial. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) dinyatakan ditolak.

Secara konseptual, kepemilikan manajerial menggambarkan proporsi saham yang dimiliki oleh para manajer, dan dalam kerangka teori agensi (Jensen & Meckling, 1976), kondisi ini seharusnya dapat menyelaraskan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Ketika manajer turut menjadi pemilik, mereka menanggung risiko atas kebijakan dan keputusan yang diambil, termasuk keputusan perpajakan, sehingga seharusnya akan jauh lebih berhati-hati dan cenderung menghindari praktik oportunistik seperti penghindaran pajak. Akan tetapi, hasil penelitian ini justru tidak mendukung prediksi teori agensi secara empiris, sebab koefisien yang muncul tidak signifikan secara statistik.

Beberapa faktor dapat menjelaskan mengapa tidak ditemukan hubungan yang signifikan tersebut. Salah satunya adalah rendahnya tingkat kepemilikan

manajerial dalam perusahaan sampel, serta minimnya variasi proporsi kepemilikan tersebut antar perusahaan, yang menyebabkan pengaruhnya sulit terdeteksi secara statistik. Selain itu, pada perusahaan dengan tata kelola yang lemah, kepemilikan manajerial tidak cukup untuk menjadi mekanisme kontrol yang efektif. Karena pengambilan keputusan strategis bisa tetap didominasi oleh pihak-pihak lain seperti pemegang saham pengendali.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Wongsinhirun et al., (2024), yang mengindikasikan bahwa hubungan antara kepemilikan manajerial dan praktik penghindaran pajak tidak bersifat linier dan bergantung pada konteks tertentu, termasuk struktur kepemilikan dan kompleksitas konflik keagenan. Studi tersebut mengungkapkan bahwa tingkat kepemilikan manajerial yang terlalu tinggi dapat meningkatkan praktik penghindaran pajak karena melemahnya pengawasan dari pihak eksternal. Sebaliknya, efek pengendalian yang kuat hanya muncul pada tingkat kepemilikan manajerial pada titik menengah, di mana keseimbangan antara insentif dan pengawasan masih berjalan secara seimbang. Dalam konteks Indonesia, struktur kepemilikan yang terkonsentrasi serta tata kelola perusahaan yang masih cenderung formalistik semakin memperlemah peran kepemilikan manajerial sebagai alat kontrol. Kondisi ini menyebabkan, meskipun secara teoritis kepemilikan manajerial mendukung mekanisme penyelarasan kepentingan sebagaimana dijelaskan dalam teori agensi, efek empiris dari kepemilikan manajerial terhadap praktik penghindaran pajak belum terlihat nyata.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Kerr et al., (2024), yang menegaskan bahwa kepemilikan manajerial baru memberikan dampak signifikan

terhadap penghindaran pajak apabila didukung oleh sistem tata kelola yang kuat dan independen. Dengan demikian, secara teori meskipun arah hubungan yang negatif sejalan dengan teori agensi, hasil empiris menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak cukup kuat secara statistik dalam menurunkan praktik *tax avoidance*. Secara umum, temuan ini mengindikasikan bahwa kepemilikan manajerial tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya instrumen untuk membatasi praktik penghindaran pajak. Perlu adanya mekanisme tata kelola yang mendukung, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan manajerial agar kepemilikan tersebut benar-benar bisa menjadi insentif bagi perilaku yang lebih etis dan sesuai dengan kepentingan jangka panjang seluruh pemangku kepentingan. Dalam implementasinya, hal ini mengindikasikan bahwa regulator dan otoritas pasar modal perlu mengarahkan reformasi tata kelola yang tidak sekadar menekankan struktur, tetapi juga memperkuat aspek kapabilitas serta independensi dalam pelaksanaannya. Agar pengaruh positif dari kepemilikan manajerial terhadap peningkatan perilaku etis perusahaan dapat terealisasi secara nyata.

4.3.2 Interpretasi Hasil *Book-Tax Differences* (BTD)

4.3.2.1 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa tata kelola perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Namun, hasil analisis regresi dengan menggunakan proksi BTD menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,687 dan nilai t sebesar 0,410. Karena angka signifikansi

tersebut jauh melampaui batas signifikansi 0,05, maka secara statistik tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara tata kelola perusahaan dan BTD. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) ditolak.

Tata kelola perusahaan khususnya dalam perspektif teori agensi, diharapkan mampu mengurangi perilaku oportunistik manajer dengan menempatkan struktur pengawasan yang mampu menjaga kepentingan pemilik modal. Dalam konteks ini, tata kelola yang efektif seharusnya membatasi kemungkinan manipulasi dalam pelaporan keuangan yang dapat memicu selisih besar antara laba akuntansi dan laba fiskal (BTD), yang biasanya menjadi indikator perencanaan pajak yang agresif. Secara teoritis, sistem tata kelola yang baik seharusnya membatasi ruang gerak manajer untuk memanfaatkan celah-celah tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah mengendalikan variabel kontrol seperti *firm size*, *leverage*, dan *capital intensity*, pengaruh tata kelola terhadap BTD tidak terbukti signifikan. Ini menegaskan bahwa fungsi *governance* formal belum cukup kuat untuk mendeteksi atau membatasi praktik perencanaan pajak agresif yang bersifat lebih kompleks dan teknis.

Penolakan terhadap hipotesis ini dapat dijelaskan lebih mendalam dengan memperhatikan konteks praktik tata kelola di Indonesia. Banyak perusahaan yang secara struktural telah membentuk komite audit dan dewan komisaris independen, namun belum tentu menjalankan fungsi pengawasan secara substansial. Dalam praktiknya, pengangkatan komisaris independen seringkali hanya bersifat simbolis, yaitu sekadar memenuhi persyaratan regulasi tanpa mempertimbangkan kapabilitas dan independensinya. Kondisi ini menghambat tata kelola untuk benar-benar

mengawasi atau menantang strategi praktik penghindaran pajak yang dilakukan manajemen melalui teknik-teknik akuntansi. Selain itu, seperti yang diungkapkan oleh Hanlon & Heitzman (2010), manipulasi dalam *Book-Tax Differences* (BTD) sering kali terjadi melalui instrumen yang sulit terdeteksi, seperti pengaturan waktu pengakuan pendapatan atau penyesuaian estimasi biaya, yang tidak mudah diawasi hanya dengan keberadaan struktur tata kelola formal.

Namun demikian, temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa mekanisme tata kelola yang diterapkan pada perusahaan sampel belum mampu mengendalikan atau memengaruhi praktik penghindaran pajak berbasis perbedaan akuntansi dan fiskal. Hal ini diakibatkan oleh kualitas tata kelola yang masih bersifat formalitas dan belum terimplementasi dengan efektif. Meskipun secara struktural telah terbentuk dewan komisaris maupun komite audit, peran keduanya belum dijalankan dengan independensi dan kapabilitas yang memadai untuk mengidentifikasi serta membatasi praktik perencanaan pajak agresif. Hasil ini selaras dengan sebagian temuan dalam literatur terdahulu. Kerr et al., (2024) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap *tax avoidance* di Meksiko, terutama setelah diterapkannya reformasi kelembagaan yang memperkuat independensi dewan. Di sisi lain, penelitian Abdelfattah & Aboud (2020) terhadap perusahaan di Mesir mengindikasikan bahwa tata kelola tidak selalu efektif mencegah *tax avoidance*, terutama jika perusahaan memiliki struktur kepemilikan terkonsentrasi atau insentif untuk memanfaatkan celah regulasi perpajakan. Hasil penelitian ini mendukung

pandangan bahwa kualitas tata kelola merupakan faktor kunci, bukan hanya strukturnya.

Dari sisi praktis, hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat tetap melakukan strategi penghindaran pajak berbasis perbedaan akuntansi dan fiskal meskipun secara struktural memiliki sistem tata kelola. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa upaya penguatan tata kelola perusahaan di Indonesia tidak cukup hanya dengan mensyaratkan pembentukan struktur formal seperti komite audit atau dewan komisaris untuk mencegah strategi penghindaran pajak berbasis BTD. Diperlukan upaya memperkuat kapasitas pengawasan dewan, independensi komite audit, dan penegakan prinsip transparansi untuk membatasi peluang manipulasi perbedaan akuntansi-fiskal yang menjadi dasar penghindaran pajak.

4.3.2.2 Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa kinerja keuangan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil regresi dengan menggunakan BTD sebagai indikator *tax avoidance* menunjukkan bahwa kinerja keuangan memiliki koefisien sebesar 0,373, dengan tingkat signifikansi 0,088 dan nilai t sebesar 1,802. Meskipun nilai signifikansi tersebut mendekati ambang 10%, angka ini tetap berada di atas batas 5%, sehingga secara statistik tidak dapat dianggap signifikan. Lebih jauh, arah koefisien yang justru positif bertentangan dengan arah hubungan yang diasumsikan dalam hipotesis awal. Oleh karena itu, hipotesis ketiga (H2), yang menyatakan bahwa kinerja keuangan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dinyatakan ditolak.

Analisis regresi yang dilakukan turut memasukkan variabel kontrol seperti *firm size*, *leverage*, dan *capital intensity* guna memastikan bahwa estimasi pengaruh ROA tidak bias oleh faktor lain. Meskipun ROA dianalisis dengan mempertimbangkan ketiga variabel tersebut, hasilnya tetap menunjukkan koefisien positif yang tidak signifikan secara statistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa profitabilitas perusahaan, dalam konteks model ini, belum mampu memberikan bukti kuat menurunkan tingkat penghindaran pajak berbasis perbedaan akuntansi dan fiskal secara konsisten di sektor farmasi yang menjadi objek penelitian.

Perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung memiliki nilai BTD yang lebih tinggi, yang berarti ada indikasi bahwa perusahaan tersebut lebih agresif dalam perencanaan pajaknya, meskipun secara statistik belum signifikan. Arah hubungan yang positif meskipun tidak signifikan ini sejalan dengan perspektif teori agensi, yang menyatakan bahwa manajer pada perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki insentif dan kapasitas yang lebih besar untuk menerapkan strategi perencanaan pajak agresif. Tindakan ini kerap dilakukan melalui manipulasi perbedaan akuntansi dan fiskal yang tercermin dalam BTD. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Gowira et al., (2024) menemukan bahwa profitabilitas memiliki hubungan positif terhadap BTD di perusahaan Indonesia, menandakan bahwa laba yang tinggi sering kali dimanfaatkan manajemen untuk memperluas strategi perencanaan pajak. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Kobbi-Fakhfakh & Bougacha (2023) menyimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan dalam indeks S&P 500, yang menunjukkan bahwa perusahaan yang *profitable*

meningkatkan strategi penghindaran pajak untuk memaksimalkan laba bersih dan menjaga arus kas terutama pada periode ketipastian ekonomi.

Temuan ini juga bisa dijelaskan oleh karakteristik khas sektor farmasi di Indonesia, yang memperoleh berbagai insentif pajak serta keleluasaan dalam mencatat biaya riset, pemasaran, maupun depresiasi aset tetap. Kondisi ini menciptakan peluang bagi perusahaan untuk melakukan manipulasi dalam pelaporan fiskal. Dengan demikian, penolakan terhadap hipotesis tidak semata-mata didasarkan pada hasil analisis statistik, melainkan juga dipengaruhi oleh konteks empiris dan struktur kelembagaan yang memengaruhi praktik pelaporan pajak di industri ini. Implikasi dari hasil ini adalah pentingnya pengawasan lebih ketat terhadap perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi, karena meskipun secara statistik tidak signifikan pada model ini, ada indikasi bahwa perusahaan *profitable* cenderung memanfaatkan celah akuntansi fiskal untuk mengurangi beban pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Hanlon (2005) yang menyatakan bahwa perbedaan besar antara laba akuntansi dan laba fiskal dapat mencerminkan praktik pelaporan pajak yang agresif, di mana laba kena pajak ditekan relatif terhadap laba komersial. Oleh karena itu, regulator perlu mempertimbangkan kebijakan yang mencegah penggunaan agresif perbedaan akuntansi-pajak sebagai sarana penghindaran pajak, melalui penguatan audit pajak, peningkatan transparansi laporan keuangan, serta pengetatan aturan perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara laporan komersial dan fiskal.

4.3.2.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil uji regresi dengan proksi BTD menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,672 dan nilai *t* sebesar -0,430. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan manajerial dan BTD. Oleh karena itu, hipotesis ketiga (H3) dinyatakan ditolak.

Kepemilikan manajerial dianggap sebagai salah satu mekanisme untuk dapat menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham, sehingga menekan potensi tindakan oportunistik seperti penghindaran pajak. Dalam kerangka teori agensi (Jensen & Meckling, 1976), manajer yang juga merupakan pemilik saham akan menanggung risiko atas tindakan yang bisa merugikan perusahaan dalam jangka panjang, termasuk risiko reputasi atau penalti akibat strategi penghindaran pajak yang agresif melalui perbedaan akuntansi dan fiskal. Namun, hasil ini menunjukkan bahwa bahkan setelah mengendalikan *firm size*, *leverage*, dan *capital intensity*, pengaruh kepemilikan manajerial terhadap BTD masih tetap tidak signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks sampel, kepemilikan manajerial belum cukup kuat untuk memengaruhi tingkat BTD. Hal ini bisa dijelaskan oleh struktur kepemilikan manajerial di perusahaan Indonesia yang cenderung rendah dan homogen, sehingga tidak mampu memberikan tekanan atau insentif pengendalian yang cukup terhadap kebijakan

perpajakan perusahaan. Selain itu, kepemilikan manajerial yang terlalu tinggi atau terlalu rendah justru dapat beresiko dan menimbulkan efek yang berlawanan. Penelitian yang dilakukan oleh Wongsinhirun et al., (2024) mengungkapkan bahwa terdapat pola hubungan non-linear antara kepemilikan manajerial dan praktik penghindaran pajak. Ketika tingkat kepemilikan manajerial berada pada level menengah, kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* justru menurun karena kepemilikan tersebut mampu menekan konflik agensi. Sebaliknya, jika kepemilikan manajerial yang terlalu tinggi, hal ini dapat melemahkan pengawasan eksternal dan membuka peluang bagi perilaku oportunistik, termasuk menjalankan strategi penghindaran pajak secara agresif.

Selain itu, efektivitas kepemilikan manajerial sebagai mekanisme pengendalian juga sangat bergantung pada kualitas sistem tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Dalam konteks di mana struktur tata kelola masih lemah atau terdapat dominasi dari pemegang saham pengendali, fungsi kepemilikan manajerial sebagai pengendali perilaku manajerial yang oportunistik menjadi kurang efektif dan cenderung tidak berjalan sebagaimana mestinya. Temuan dari penelitian Kerr et al., (2024) menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh manajer tidak otomatis mampu meredam tindakan oportunistik apabila tidak disertai dengan reformasi kelembagaan yang menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas. Artinya, agar kepemilikan manajerial dapat benar-benar berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang efektif, diperlukan reformasi *governance* secara menyeluruh yang mendukung implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam praktik nyata.

Berdasarkan hasil ini, dapat ditarik implikasi bahwa kebijakan yang hanya mendorong peningkatan kepemilikan manajerial semata tidak cukup untuk menekan penghindaran pajak berbasis BTD. Upaya tersebut harus disertai dengan penguatan tata kelola perusahaan, transparansi dalam pelaporan keuangan serta akuntabilitas manajerial. Selain itu, pengungkapan publik atas kebijakan pajak dan struktur kepemilikan juga perlu untuk diperhatikan agar pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dapat menilai apakah kepemilikan manajerial benar-benar mampu mendorong perilaku etis dan kepatuhan pajak yang tinggi.

4.3.3 Variabel Kontrol

Penelitian ini mengikutsertakan tiga variabel kontrol, yakni *firm size*, *leverage*, dan *capital intensity*, dengan tujuan untuk mengendalikan faktor eksternal yang berpotensi memengaruhi hubungan antara variabel independen dan penghindaran pajak. Hasil analisis regresi mengungkapkan bahwa dari ketiga variabel tersebut, hanya *leverage* yang terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, baik dalam model dengan proksi *Effective Tax Rate* (ETR) maupun *Book-Tax Differences* (BTD). Sebaliknya, *firm size* dan *capital intensity* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik. Temuan signifikan pada variabel *leverage*, dengan tingkat signifikansi 0,001 untuk ETR dan 0,019 untuk BTD, mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan, semakin rendah beban pajak efektif yang ditanggungnya. Kondisi ini mencerminkan bahwa perusahaan dengan struktur pembiayaan yang lebih banyak bergantung pada utang cenderung melakukan penghindaran pajak, memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Temuan ini sejalan dengan

teori agensi yang menyatakan bahwa struktur utang yang tinggi dapat digunakan sebagai mekanisme kontrol terhadap perilaku manajerial oportunistik, namun juga membuka peluang untuk meminimalkan beban pajak secara legal. Penelitian ini diperkuat oleh Gowira et al., (2024) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, walaupun dalam penelitian mereka pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Ketidaksesuaian hasil ini dapat dijelaskan oleh variasi sektor industri serta perbedaan dalam metode pengukuran *leverage*, seperti penggunaan rasio utang jangka panjang terhadap total aset dibanding *total debt ratio*.

Di sisi lain, *firm size* tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, baik pada model ETR ($p = 0,787$) maupun BTM ($p = 0,079$). Hal ini menunjukkan bahwa besarnya ukuran perusahaan, yang dalam hal ini diukur melalui logaritma natural total aset, bukanlah faktor penentu dalam strategi penghindaran pajak perusahaan farmasi yang menjadi objek penelitian. Artinya, perusahaan yang lebih besar tidak selalu melakukan perencanaan pajak yang lebih agresif dibanding perusahaan yang lebih kecil. Karena keputusan tersebut lebih banyak ditentukan oleh struktur insentif, tata kelola, dan preferensi manajerial. Hasil ini sejalan dengan temuan Gowira et al., (2024) yang juga menyimpulkan bahwa *firm size* tidak memengaruhi *tax avoidance* dalam berbagai model yang mereka gunakan. Sementara itu, *capital intensity* yang mencerminkan proporsi aset tetap terhadap total aset juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dalam kedua model, yakni ETR ($p = 0,947$) dan BTM ($p = 0,390$). Meskipun secara teori perusahaan dengan intensitas modal tinggi memiliki

peluang untuk memanfaatkan penyusutan aset guna mengurangi penghasilan kena pajak. Namun, dalam praktiknya, hal ini tampaknya tidak cukup kuat untuk mendorong perbedaan signifikan dalam strategi penghindaran pajak antar perusahaan.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Widiani & Trisnawati (2024), yang menyatakan bahwa pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* bersifat kontekstual dan dalam beberapa model bahkan tidak signifikan. Ketidaksesuaian hasil antar penelitian ini menegaskan bahwa *capital intensity* terhadap penghindaran pajak sangat bergantung pada kebijakan akuntansi perusahaan dan struktur pajak yang berlaku. Secara keseluruhan, hasil uji terhadap variabel kontrol dalam penelitian ini menegaskan bahwa struktur pembiayaan perusahaan melalui *leverage* merupakan faktor yang paling konsisten berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, *firm size* dan *capital intensity* tidak memberikan pengaruh yang cukup berarti secara statistik. Hal ini memberikan implikasi bahwa regulator dan otoritas pajak agar lebih cermat dalam memperhatikan struktur pendanaan perusahaan ketika menilai potensi penghindaran pajak. Selain itu, hasil ini mengindikasikan bahwa strategi *tax avoidance* lebih banyak dipengaruhi oleh keputusan pembiayaan dan struktur insentif, dibandingkan dengan ukuran dan struktur aset yang dimiliki perusahaan.

4.3.4 Hasil Perbandingan Pengujian dengan Proksi ETR dan BTD

Penelitian ini menggunakan dua indikator untuk mengukur penghindaran pajak, yaitu *Effective Tax Rate* (ETR) dan *Book-Tax Difference* (BTD), guna

memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh. ETR merefleksikan beban pajak efektif yang benar-benar dibayar oleh perusahaan, sementara BTD menangkap selisih antara laba akuntansi dan laba kena pajak yang dapat muncul akibat strategi perencanaan pajak berbasis perbedaan akuntansi dan fiskal (Hanlon & Heitzman, 2010). Penggunaan kedua proksi ini memungkinkan analisis dari sudut pandang yang berbeda terhadap perilaku *tax avoidance*.

Hasil regresi menunjukkan perbedaan pengaruh pada beberapa variabel independen tergantung pada proksi yang digunakan. Pada model dengan ETR, kinerja keuangan dan variabel kontrol *leverage* berpengaruh negatif signifikan pada taraf 5%, menandakan perusahaan yang lebih *profitable* dan lebih *leverage* cenderung membayar pajak lebih rendah (ETR lebih rendah), yang artinya menandakan tingkat *tax avoidance* yang lebih tinggi. Sementara itu, pada model dengan BTD, hanya *leverage* yang berpengaruh signifikan dan positif, sedangkan kinerja keuangan tidak signifikan meski arahnya positif. Ini menunjukkan bahwa pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak lebih konsisten muncul pada beban pajak efektif daripada pada selisih akuntansi dan fiskal.

Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh karakteristik masing-masing proksi. ETR lebih merepresentasikan beban pajak yang secara langsung ditanggung perusahaan, sehingga lebih cepat memberikan gambaran mengenai tingkat penghindaran pajak melalui strategi yang bersifat eksplisit, misalnya penggunaan utang untuk memperoleh *tax shield* atau pemanfaatan insentif pajak tertentu (Zimmerman, 1983). Sementara itu, BTD lebih menekankan pada selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal, sehingga perbedaan tersebut secara kasat mata lebih

mudah terlihat ketika dibandingkan. Strategi ini memerlukan fleksibilitas kebijakan akuntansi, tingkat agresivitas pelaporan yang tinggi, dan kapasitas manajemen untuk melakukan rekayasa akuntansi tanpa melanggar aturan formal. Secara teoritis, hal ini selaras dengan penjelasan Hanlon & Heitzman (2010) bahwa ETR dan BTM mengukur dimensi *tax avoidance* yang berbeda, sehingga variabel yang signifikan pada satu proksi belum tentu signifikan pada proksi lainnya.

Ditinjau dari perspektif makna ekonomis, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung mendorong upaya penghematan pajak yang langsung terlihat pada beban pajak efektif, namun tidak selalu disertai dengan manipulasi akuntansi yang memunculkan selisih besar antara laba akuntansi dan fiskal. Kondisi tersebut kemungkinan disebabkan karena perusahaan yang *profitable* memilih strategi penghindaran pajak yang relatif aman guna menjaga reputasi dan menghindari risiko terkena pemeriksaan pajak yang ketat. Sedangkan, BTM cenderung lebih sensitif dalam menangkap adanya perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas apabila perusahaan melakukan strategi penghindaran pajak yang kompleks (Chen et al., 2010).

Leverage terbukti signifikan pada kedua proksi, mengindikasikan bahwa perusahaan dengan *leverage* tinggi cenderung menggunakan strategi *tax avoidance* baik dengan menurunkan ETR maupun menaikkan BTM. Temuan ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa manajer memanfaatkan struktur modal untuk merancang strategi *tax avoidance* demi meningkatkan nilai perusahaan. Dukungan empiris juga terlihat dalam studi Zhu et al., (2023) dan Widiani &

Trisnawati, (2024) yang menekankan pengaruh *leverage* pada berbagai bentuk perencanaan pajak. Sementara itu variabel lain seperti tata kelola perusahaan, kepemilikan manajerial, *firm size*, dan *capital intensity* tidak menunjukkan pengaruh signifikan pada kedua proksi, sehingga tidak memberikan kontribusi berarti dalam menjelaskan variasi penghindaran pajak pada model ini.

Berdasarkan hasil uji regresi, model dengan proksi ETR menghasilkan nilai *Adjusted R²* sebesar 0,391, yang berarti bahwa 39,1% variasi praktik *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel independen dan variabel kontrol. Sedangkan, model dengan proksi BTD menghasilkan *Adjusted R²* sebesar 0,239. Atau hanya mampu menjelaskan 23,9% variasi *tax avoidance*. Perbedaan ini menunjukkan bahwa variabel independen dan variabel kontrol dalam penelitian ini lebih kuat dalam menjelaskan penghindaran pajak ketika diukur menggunakan ETR dibandingkan dengan BTD. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ETR lebih mampu menjelaskan praktik penghindaran pajak dibandingkan BTD pada konteks penelitian ini.

Oleh karena itu, perbandingan kedua proksi menegaskan pentingnya pendekatan multi-proksi dalam mengkaji *tax avoidance*. Perbedaan pengaruh antar variabel menunjukkan bahwa penghindaran pajak bersifat kompleks dan tidak dapat diukur hanya dari satu sisi dan dapat muncul dalam bentuk pengurangan tarif efektif maupun manipulasi akuntansi fiskal. Oleh karena itu, perlunya pengawasan pajak yang lebih menyeluruh tidak hanya berfokus pada tarif efektif yang dibayar tetapi juga pada kualitas pelaporan akuntansi untuk mendeteksi praktik perencanaan pajak yang agresif. Dari sisi kebijakan, otoritas pajak dapat menerapkan mekanisme audit

berbasis risiko terhadap perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi atau BTD besar, disertai kewajiban untuk mengungkapkan rekonsiliasi antara laporan fiskal dan akuntansi secara lebih rinci, serta memperkuat transparansi pelaporan strategi pajak dalam laporan tahunan. Penerapan langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi celah regulasi yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak secara berlebihan, baik yang tercermin melalui ETR maupun BTD.